**2019**

Dinas Komunikasi dan Informatika



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

**(LKjIP)**



# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah  dapat selesai dikerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemrintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah ini disusun guna memenuhi amanat yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi SAKIP Pemerintah daerah yang diselenggarakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Menjadi salah satu prosedur dalam pengendalian, Perangkat Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi bupati melalui progress pencapaian tujuan dan sasaran daerah pada setiap tahunnnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini bisa menjadi salah satu alat ukur dan media informasi terkait capaian keberhasilan dan evaluasi kegagalan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan dan umpan balik pencapaian prestasi kerja pada setiap tahun kinerja.

Ungaran, 28 Februari 2020   
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sunarto, S.H.

NIP. 196501061991031008

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih produktif, efektif, efisien dan profesional maka dokumen pelaporan ini diharapkan mampu menjadi alat ukur capaian kinerja dalam upaya mewujudkan visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang melalui yang mengacu pada pencapaian progress target kinerja. Berikut merupakan hasil capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

**Tabel Capaian realisasi target indikator kinerja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Kinerja** | **Realisasi Keuangan** | **Ket** |
| 1 | Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | 100,00 | 94,38 | Baik |
|  |  | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | 100,00 | 78,42 | Baik |
|  |  | Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan | Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | 100,00 | 90,04 | Baik |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang sandi dan telekomunikasi, dan statistik. Dinas Komunikasi Dan Informatika yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 14, Telepon (024) 76901553 Fax.   Ungaran 50511 dipimpin oleh Kepala Dinas Sunarto, S.H., M.H. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 1. Daftar Jabatan Dan Eselon Dinas Komunikasi Dan Informatika**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA JABATAN** | **ESELON** | **JUMLAH** |
| Kepala Dinas | IIb | 1 |
| Sekretaris | IIIa | 1 |
| Kepala Bidang | IIIb | 3 |
| Kepala Subbagian | IVa | 2 |
| Kepala Seksi | IVa | 6 |
| Jumlah |  | 13 |

Dinas Komunikasi Dan Informatika **mempunyai susunan Organisasi:**

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi:
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
6. Seksi Informasi Publik.
7. Seksi Komunikasi Publik.
8. Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi:
9. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
10. Seksi Pengelolaan *E-Government* dan Aplikasi.
11. Bidang Persandian dan Statistik membawahi:
12. Seksi Persandian.
13. Seksi Statistik.

**B. Ketersediaan Sumber daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 44 personil, yang terdiri dari 35 personil PNS, dan 9 personil Non PNS

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**

| **Klasifikasi** | **Jumlah** |
| --- | --- |
| Komposisi Menurut Golongan |  |
| * Golongan IV | 7 |
| * Golongan III | 19 |
| * Golongan II | 8 |
| * Golongan I | 1 |
| * Non PNS | 9 |
| Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan |  |
| * Sarjana S2 | 8 |
| * Sarjana S1 | 13 |
| * Sarjana Muda / D3 | 4 |
| * SLTA | 9 |
| * SMP | 1 |
| * SD | 0 |
| Komposisi Menurut Umur |  |
| * 20 – 30 tahun | 1 |
| * 31 – 40 tahun | 8 |
| * 41 – 50 tahun | 12 |
| * 51 – 58 tahun | 14 |
| Jumlah | 35 |

**C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja**

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Nilai (Rp)** | **Kondisi** |
| Gedung | 2.515.952.919 | Baik |
| Peralatan / Mesin | 8.893.412.282 | Baik |
| Jalan irigasi, jaringan | 970.193.371 | Baik |
| Aset dan lainnya | - | Baik |
| Jumlah | 12.379.558.572 |  |
| Penyusutan | (4.644.293.064,56) |  |

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas semua dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam mendukung kegiatan kedinasan.

**D. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan**

Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Pembiayaan** | **Anggaran** |
| Belanja Tidak Langsung | 3.466.400.000 |
| Belanja Langsung : | 5.187.987.000 |
| - Belanja Pegawai | 52.002.000 |
| - Belanja Barang dan Jasa | 4.385.941.000 |
| - Belanja Modal | 750.044.000 |
| Jumlah | 8.654.387.000 |

**E. Permasalahan Utama**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Satu Data Untuk Pembangunan Kabupaten Semarang.

Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan Daerah harus dilandasi oleh data dan informasi akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan landasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

1. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, dan terus berupaya mencari informasi yang relevan dengan kondisi yang sedang dihadapinya.

1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan Informasi.

Perkembangan ilmu teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bias dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Apabila tidak diantisipasi secara cepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

1. Penyebaran Informasi kurang merata karena kerjasama dengan media cetak, ataupun media elektronik kurang

Penyebaran informasi sangatlah penting bagi Pemerintah daerah, karena merupakan acuan bagi masyarakat guna mengetahui arah dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor kurangnya pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan media.

1. Masih minimnya kualitas Sumber daya manusia bidang TIK

Dinas Komunikasi dan Informatika masih kekurangan SDM yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika sebagai agen pengolah dan penyebar informasi mutlak diperlukan guna memunculkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang berkewajiban untuk menyampaikan  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah berdasarkan tugas pokok fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara valid dan akuntabel.

**G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun berkenaan:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2010, tentang  Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

**Bab I    : Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

**Bab II    : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran strategis yang ingin diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Renstra   
**Bab III    : Akuntabilitas Kinerja**

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

**Bab IV    : Penutup**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

**Lampiran – lampiran**

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. Visi dan Misi Perangkat Daerah**

**Visi**  
PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II)

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam membantu melaksanakan visi Bupati yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

**Misi**  
1. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

**B. Perencanaan Kinerja**

**Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja**

| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Keterangan** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | Indikator ini untuk mengukur tingkat aksestabilitas jaringan komunikasi dan informasi elektronik pada wilayah kabupaten semarang | 100 % |
|  |  | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database); | Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | Indikator ini untuk mengukur tingkat aksestabilitas jaringan komunikasi dan informasi elektronik pada wilayah kabupaten semarang | 6,56 |
|  |  | Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan | Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | Indikator ini untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan keterbukaan informasi terkait pembangunan Kabupaten Semarang | 29,59 % |

**C. Perjanjian Kinerja**

**Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran Strategi** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** |
| Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | 100 % |
|  | Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan | Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | 29,59 % |
|  | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | 56,52 % |

**Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja**

| **Indikator Kinerja Utama** | **Program/Kegiatan** | **Target** |
| --- | --- | --- |
| Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Rp. 1.417.000.000,00 |
|  | Program kerjasama informasi dan media massa | Rp. 500.000.000,00 |
| Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | Program kerjasama informasi dan media massa | Rp. 1.437.162.000,00 |
|  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Rp. 434.000.000,00 |
| Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 170.000.000,00 |
|  | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Rp. 170.000.000,00 |
|  | Pogram Persandian | Rp. 80.000.000,00 |

Keterangan: Angka 0 (nol) pada Program merupakan Program yang mendukung lebih dari satu indikator

**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Capaian Kinerja Indikator Kinerja**
   1. **Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel**
2. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)

Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kinerja ini berhubungan dengan infrastruktur jaringan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target 2019** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2018** | **%** | **Target 2021** |
| Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

**Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Program/Kegiatan** | **Target** |
| Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Rp. 1.417.000.000,00 |
|  | Program kerjasama informasi dan media massa | Rp. 500.000.000,00 |

Hambatan yang terjadi dalam mencapai target

1. Kondisi cuaca di Repeater gunung telomoyo yang sering mengakibatkan kerusakan peralatan wireless.
2. Kondisi jarigan internal SKPD mengakibatkan kinerja perangkat jaringan tidak maksimal

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi antara lain:

1. Diperlukan pergeseran media trasmisi data dari media wireless ke jaringan dengan media kabel fiber optik dengan melakukan sewa jaringan fiber optik untuk kantor kecamatan.
2. Memberikan rekomendasi rancangan topologi jaringan yang baik
   1. **Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target 2019** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2018** | **%** | **Target 2021** |
| Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

**Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Program/Kegiatan** | **Target** |
| Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | Program kerjasama informasi dan media massa | Rp. 1.437.162.000,00 |
|  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Rp. 434.000.000,00 |

Hambatan:

1. Masih ada beberapa OPD yang belum dan kurang aktif dalam memberikan informasi public

Solusi:

1. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya informasi publik
2. Memberikan pemahaman kepada OPD untuk mengoptimalkan fungsi PPID pembantu dalam memberikan pelayanan informasi publik
   1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target 2019** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2018** | **%** | **Target 2021** |
| Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | 6,56 | 6,56 | 0,00 | 100,00 | 6,56 |

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

**Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Program/Kegiatan** | **Target** |
| Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 170.000.000,00 |
|  | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Rp. 170.000.000,00 |
|  | Pogram Persandian | Rp. 80.000.000,00 |

Hambatan:

1. pelaksanaan kegiatan pelatihan SDM yang direncanakan mengirim 6 personil dengan komposisi 4 Personil PNS dan 2 Personil Non PNS untuk mengikuti Kegiatan Bintek Keamanan Informasi, namun dalam pelaksanaannya hanya dapat mengirimkan 4 personil dikarenakan Persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebuit harus PNS sehingga 2 personil lainnya tidak dapat mengikutinya.

Solusi:

1. tetap mengirimkan 4 personil untuk mengikuti pelatihan keamanan informasi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan

 **B. Capaian Kinerja Keuangan**

**Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Prosentase (%)** |
| 1 | Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | 1.917.000.000,00 | 1.809.270.150,00 | 94,38 |
|  |  | Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan | Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | 1.871.162.000,00 | 1.684.777.177,00 | 90,04 |
|  |  | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | 420.000.000,00 | 329.351.283,00 | 78,42 |

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja perangkat daerah di lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan Pelaporan hasil kinerja pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019 pelaksanaan RPJMD periode 2016 – 2021 yang menyajikan capaian keberhasilan maupun kendala dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, hal ini tercermin pada capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah dan masyarakat.  
Kemudian dalam mengukur efektifitas dan efesiensi kinerja, berdasarkan tabel perbandingan capaian Kinerja dengan capaian Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika, dalam mewujudkan visi, misi pembangunan tahun 2016-2021 melalui pencapaian 3 Indikator Kinerja pada 1 tujuan dan 3 sasaran mencapai total rata rata ± 66,67% dengan realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 87,61%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan efesiensi Keuangan terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Berikut merupakan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran.

Tabel 4.1. Tabel perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran

| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Kinerja** | **Realisasi Keuangan** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database) | Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik | 100,00 | 94,38 | Baik |
|  |  | Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan | Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah | 100,00 | 90,04 | Baik |
|  |  | Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal | Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal | 100,00 | 78,42 | Baik |